

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa pada tahun 2020 (BPS Indonesia, 2021). Bonus demografi yang sedang berlangsung memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan tenaga kerja produktif. Menurut Bappenas (2020), bonus demografi diproyeksikan berlangsung hingga 2030, ketika proporsi penduduk usia produktif mencapai puncaknya. Namun, peluang ini tidak akan otomatis memberikan keuntungan ekonomi tanpa kebijakan yang tepat untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan produktivitas tenaga kerja.

Dalam literatur ekonomi pembangunan, bonus demografi sering dianggap sebagai *window of opportunity*, sebuah periode singkat di mana suatu negara dapat mempercepat pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya tenaga kerja yang melimpah (Nasution, 2021). Menurut Todaro dan Smith (2020), jika dikelola dengan baik, periode bonus demografi dapat meningkatkan produktivitas nasional melalui peningkatan kontribusi angkatan kerja. Negara-negara seperti Korea Selatan dan China telah membuktikan bahwa bonus demografi dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang luar biasa ketika diiringi dengan kebijakan pendidikan dan industrialisasi yang tepat (Mason & Kinugasa, 2008). Dalam konteks Indonesia, pengembangan sektor industri dan layanan yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar menjadi prioritas

har dapat memanfaatkan keuntungan demografi ini.

Namun, meskipun Indonesia sedang berada di tengah-tengah bonus demografi, manfaat penuh dari potensi ini tidak bisa dicapai hanya dengan



mengandalkan jumlah angkatan kerja yang besar. Tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah kualitas dari tenaga kerja tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Mankiw (2019), produktivitas tenaga kerja menjadi kunci dalam menentukan sejauh mana suatu negara dapat mengkonversi bonus demografi menjadi pertumbuhan ekonomi yang nyata. Peningkatan produktivitas tenaga kerja sangat erat kaitannya dengan akses terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan yang relevan, serta kesehatan yang memadai.

Menurut BPS Indonesia (2021), meskipun tingkat partisipasi angkatan kerja Indonesia relatif tinggi, ada disparitas yang cukup signifikan dalam hal kualitas tenaga kerja antar daerah. Daerah-daerah perkotaan seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur cenderung memiliki tenaga kerja dengan pendidikan dan keterampilan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah pedesaan atau terpencil seperti Papua dan Maluku. Wicaksono (2012) menekankan bahwa disparitas dalam kualitas pendidikan dan akses terhadap layanan kesehatan masih menjadi penghambat utama dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan. Ketimpangan ini dapat membatasi kemampuan Indonesia untuk memaksimalkan manfaat dari bonus demografi, terutama di daerah-daerah yang tertinggal.

Lebih jauh, kebijakan pemerintah yang berfokus pada peningkatan kualitas Program-program yang digagas pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Pra-Kerja bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelatihan kerja yang lebih baik. Namun, efektivitas program-program ini masih diperdebatkan, mengingat masih banyaknya daerah-daerah

tinggal dalam hal infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Todaro dan (20) menegaskan bahwa tanpa peningkatan signifikan dalam kualitas



tenaga kerja, jumlah penduduk yang besar bisa menjadi beban ekonomi, bukan keuntungan.

Sebagai tambahan, kualitas kesehatan juga memainkan peran penting dalam menentukan produktivitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang sehat cenderung lebih produktif, dan peningkatan akses ke layanan kesehatan dasar di seluruh Indonesia harus menjadi prioritas utama. Yuliasuti (2023) mencatat bahwa peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, seperti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meskipun sudah berjalan, masih memerlukan perbaikan dari segi pemerataan dan kualitas layanan, terutama di daerah-daerah terpencil. Tanpa intervensi yang signifikan dalam peningkatan kesehatan dan pendidikan, bonus demografi yang dinikmati Indonesia saat ini berisiko berlalu tanpa dampak yang maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Partisipasi angkatan kerja merupakan indikator penting yang mencerminkan sejauh mana penduduk usia kerja aktif terlibat dalam aktivitas ekonomi. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau Labor Force Participation Rate (LFPR) mengukur persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau secara aktif mencari pekerjaan. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang terlibat dalam pasar tenaga kerja, yang berarti potensi ekonomi suatu wilayah dimanfaatkan secara lebih optimal (Badan Pusat Statistik, 2023). Di Sulawesi Selatan, pemantauan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi penting mengingat wilayah ini memiliki potensi ekonomi, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan.

Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja dapat mencerminkan keselarasan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Ketika partisipasi angkatan kerja tinggi, ini bisa berarti bahwa kondisi ekonomi dan lapangan kerja



sedang membaik, menarik lebih banyak orang untuk mencari pekerjaan. Sebaliknya, penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja bisa menjadi sinyal adanya masalah struktural dalam perekonomian, seperti ketidakmampuan pasar kerja untuk menyerap angkatan kerja yang ada, atau kurangnya insentif bagi penduduk usia kerja untuk masuk ke pasar tenaga kerja (Mankiw, 2019).

Di Sulawesi Selatan, analisis terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi penting untuk memahami dinamika pasar tenaga kerja regional. Wilayah ini memiliki karakteristik ekonomi yang unik, dengan kombinasi antara sektor tradisional seperti pertanian dan sektor modern seperti industri dan jasa. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat memberikan gambaran tentang bagaimana perubahan ekonomi dan kebijakan pemerintah berdampak pada keterlibatan penduduk dalam aktivitas ekonomi. Misalnya, peningkatan investasi di sektor industri dan infrastruktur diharapkan dapat menarik lebih banyak tenaga kerja ke sektor formal (BPS Sulawesi Selatan, 2023).

Untuk mengetahui seberapa besar partisipasi sumber daya manusia atau dari besarnya penduduk usia kerja yang berpartisipasi pada angkatan kerja. Pada tahun 2019, berdasarkan BPS Indonesia, penduduk usia kerja yang berpartisipasi pada angkatan kerja mencapai 67,53 persen. Hal tersebut dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 1. 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Indonesia dan Pulau Sulawesi 2019-2023

Wilayah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indonesia	67,53	67,77	67,80	68,63	69,48
Sulawesi Utara	63,94	63,42	62,51	63,08	64,09
Sulawesi Tengah	67,80	69,44	68,73	69,99	69,85



Sulawesi Selatan	63,80	63,40	64,73	66,18	65,66
Sulawesi Tenggara	69,11	69,83	70,09	68,82	70,07
Gorontalo	67,38	66,46	65,94	68,91	70,79
Sulawesi Barat	69,89	70,19	70,27	73,00	71,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam **Tabel 1.1**, terlihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan, mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi di Sulawesi terjadi pada tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Barat, yang mencapai 73 persen. Sebaliknya, tingkat partisipasi angkatan kerja terendah tercatat di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2021, dengan angka sebesar 62,51 persen. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial di masing-masing provinsi.

Secara khusus, Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan tingkat partisipasi angkatan kerja terendah kedua di Pulau Sulawesi, hanya sedikit lebih baik dibandingkan Sulawesi Utara yang berada di peringkat terakhir. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang rendah ini menjadi indikator adanya tantangan serius dalam perekonomian daerah yang perlu segera diatasi oleh pemangku kepentingan. Jika tidak ditangani secara efektif, situasi ini berpotensi memperburuk masalah pengangguran di wilayah tersebut, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan penurunan pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat (Ramadhan, 2023). Tingginya angka pengangguran menjadi cerminan dari



Seimbang antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan permintaan pekerjaan, yang membutuhkan perhatian dan intervensi kebijakan yang

Kondisi partisipasi angkatan kerja yang rendah di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya masalah struktural yang mendesak untuk diatasi. Meskipun begitu, salah satu langkah yang dapat berperan penting dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja adalah dengan memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja. Secara teori, pertumbuhan ekonomi yang positif menciptakan lebih banyak peluang kerja, yang pada gilirannya mendorong lebih banyak orang untuk terlibat dalam pasar tenaga kerja. Di Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan peningkatan dalam penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor, terutama di sektor- sektor kunci seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan (Bappenas, 2020). Pertumbuhan ini seharusnya berkontribusi pada peningkatan partisipasi angkatan kerja, karena lebih banyak individu yang terdorong untuk bekerja atau mencari pekerjaan.

Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor kunci yang berkaitan langsung dengan peningkatan TPAK. Menurut Mankiw (2021), ketika ekonomi tumbuh, perusahaan cenderung memperluas operasi dan meningkatkan kapasitas produksinya, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Hal ini selanjutnya meningkatkan permintaan tenaga kerja dan mendorong penduduk usia kerja untuk bergabung dalam angkatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga memberi pemerintah lebih banyak sumber daya untuk berinvestasi dalam program pendidikan dan pelatihan kerja, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas tenaga kerja (Todaro & Smith, 2020).



nun, penting untuk mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu
ng lurus dengan peningkatan TPAK. Di beberapa negara berkembang,

pertumbuhan ekonomi yang tinggi mungkin tidak diiringi oleh peningkatan kesempatan kerja yang sepadan, terutama jika pertumbuhan tersebut didorong oleh sektor-sektor yang padat modal, seperti industri manufaktur atau teknologi, yang lebih sedikit menyerap tenaga kerja. Ini disebut sebagai "pertumbuhan tanpa pekerjaan" (*jobless growth*), yang dapat menyebabkan TPAK stagnan meskipun ekonomi tumbuh (Blanchard, 2017). Di Indonesia, fenomena ini bisa saja terjadi terutama di daerah yang berorientasi pada sektor-sektor industri yang padat modal.

Sulawesi Selatan, dengan ekonominya yang didominasi oleh sektor pertanian, jasa, dan perdagangan, memiliki potensi untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang beragam (BPS Sulawesi Selatan, 2021). Namun, sektor-sektor ini sering kali menawarkan pekerjaan dengan produktivitas rendah dan upah yang tidak memadai, yang berpotensi menurunkan insentif untuk masuk ke pasar kerja formal. Pengangguran terselubung di sektor pertanian adalah masalah yang dihadapi di banyak daerah di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan. Pengangguran terselubung ini mengacu pada situasi di mana individu dianggap bekerja, tetapi produktivitas mereka rendah dan kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi minim (Faradila & Imaningsih, 2021).

Kebijakan ekonomi yang berfokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan ke dalam peningkatan TPAK. Todaro dan Smith (2020) menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan sebagai komponen penting dalam menciptakan tenaga kerja yang

dan berdaya saing. Sulawesi Selatan sendiri telah meluncurkan berbagai pelatihan keterampilan, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas



tenaga kerja dan mendorong lebih banyak individu untuk masuk ke pasar kerja formal (BPS Sulawesi Selatan, 2021).

Upah juga menjadi faktor penting yang berkaitan dengan TPAK dan pertumbuhan ekonomi. Sebuah studi oleh Iksan (2020) menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum yang moderat dapat mendorong partisipasi tenaga kerja, terutama di sektor formal. Di Sulawesi Selatan, peningkatan upah minimum provinsi dari tahun ke tahun menjadi salah satu pendorong TPAK yang cukup signifikan. Namun, peningkatan upah ini juga perlu diseimbangkan dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja agar tidak membebani pengusaha, terutama di sektor- sektor yang padat karya seperti manufaktur dan pertanian.

Seiring dengan upaya meningkatkan partisipasi angkatan kerja, penting juga untuk memastikan inklusi dalam pasar kerja. Bano (2022) mencatat bahwa partisipasi perempuan di Sulawesi Selatan masih tertinggal dibandingkan dengan partisipasi laki- laki. Hal ini menjadi perhatian karena dalam jangka panjang, peningkatan partisipasi perempuan dalam pasar kerja dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga, serta akses yang lebih luas ke pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan.

Selain itu, migrasi tenaga kerja juga menjadi isu penting dalam konteks TPAK dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Banyak penduduk dari wilayah pedesaan yang bermigrasi ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan, yang dapat meningkatkan TPAK di daerah perkotaan tetapi menurunkan

di daerah pedesaan. Menurut penelitian oleh Hadijah (2020), migrasi tenaga kerja ini dapat menyebabkan ketimpangan antara daerah perkotaan dan



pedesaan dalam hal kesempatan kerja dan kualitas hidup, yang berpotensi mempengaruhi stabilitas pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan kebijakan inklusif adalah elemen-elemen kunci yang saling berinteraksi dalam mempengaruhi TPAK di Sulawesi Selatan. Dengan adanya fokus pada sektor-sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja, serta kebijakan pendidikan dan pelatihan yang efektif, diharapkan dapat terjadi peningkatan partisipasi angkatan kerja yang diiringi dengan peningkatan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yakni;

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan?
3. Apakah Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan?
4. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Sulawesi Selatan.



Untuk mengetahui apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Sulawesi Selatan.

3. Untuk mengetahui apakah Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Sulawesi Selatan.
4. Untuk mengetahui apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Analisis empiris ini dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya untuk mengembangkan studi terkait dinamika tenaga kerja di wilayah dengan karakteristik serupa, baik melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.
2. Penelitian ini memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan di Sulawesi Selatan untuk memahami pengaruh pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan jumlah penduduk terhadap TPAK. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berfokus pada peningkatan partisipasi tenaga kerja.
3. Penelitian ini memberikan informasi bagi sektor swasta, khususnya pelaku usaha di Sulawesi Selatan, untuk memahami dinamika pasar tenaga kerja lokal. Dengan demikian, sektor swasta dapat lebih strategis dalam merancang kebijakan penggajian dan pengembangan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan regulasi pemerintah.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari kerja, terhadap total penduduk usia kerja. TPAK menjadi indikator penting dalam menganalisis keterlibatan penduduk dalam pasar tenaga kerja dan dinamika ekonomi suatu wilayah (BPS Indonesia, 2020). Tingginya TPAK mencerminkan optimalisasi sumber daya manusia, sementara TPAK yang rendah dapat mengindikasikan adanya hambatan struktural atau sosial dalam pasar tenaga kerja.

Selain faktor ekonomi, karakteristik demografis dan sosial juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi TPAK. Chairunnisa (2022) menyebutkan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan dua faktor kunci yang menentukan apakah individu usia produktif dapat berpartisipasi secara optimal dalam pasar tenaga kerja. Semakin baik akses terhadap pendidikan dan kesehatan, semakin besar peluang seseorang untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi formal. Sebaliknya, daerah dengan akses yang terbatas terhadap kedua faktor ini sering kali memiliki TPAK yang rendah, terutama di sektor formal.

Penting untuk diketahui bahwa TPAK tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah lapangan kerja yang tersedia, tetapi juga oleh keinginan individu untuk bekerja.

Borjas (2019) menjelaskan bahwa dalam teori ekonomi tenaga kerja, keputusan untuk bekerja atau tidak bekerja juga dipengaruhi oleh upah yang akan diterima, serta manfaat lain yang dapat diperoleh dari bekerja dibandingkan dengan tidak bekerja. Oleh karena itu, kebijakan seperti upah minimum dan



program kesejahteraan sosial juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap TPAK.

Selain itu, TPAK juga dipengaruhi oleh kondisi demografis. Di Indonesia, bonus demografi yang sedang berlangsung, di mana proporsi penduduk usia kerja lebih besar daripada penduduk usia non-produktif, menciptakan peluang bagi peningkatan TPAK. Nasution (2017) menyebutkan bahwa selama periode bonus demografi ini, penting untuk menciptakan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja yang produktif sehingga penduduk usia kerja dapat secara optimal berpartisipasi dalam ekonomi. Namun, jika kebijakan tidak tepat, bonus demografi ini dapat berlalu tanpa memberikan manfaat ekonomi yang signifikan.

Dalam konteks pembangunan daerah, TPAK juga menjadi indikator penting untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu wilayah. Daerah dengan TPAK yang tinggi cenderung memiliki ekonomi yang lebih dinamis, dengan lebih banyak penduduk yang terlibat dalam aktivitas ekonomi formal. Sebaliknya, daerah dengan TPAK rendah sering kali mengalami tantangan dalam hal pengangguran dan ketergantungan ekonomi pada sektor informal. Bano (2022) menambahkan bahwa penguatan kebijakan regional yang berfokus pada peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan dan kelompok rentan dapat menjadi langkah penting untuk mendorong peningkatan TPAK di daerah-daerah tertinggal.

2.1.3 Teori Penawaran Tenaga Kerja

Teori penawaran tenaga kerja berfokus pada bagaimana individu memutuskan untuk bekerja berdasarkan preferensi antara waktu luang dan pendapatan. Dalam ekonomi mikro, keputusan individu untuk bekerja atau tidak



adalah hasil dari pertukaran antara konsumsi dan waktu luang, di mana waktu luang dianggap sebagai barang normal yang memberikan kepuasan

(Borjas, 2019). Penawaran tenaga kerja pada dasarnya mencerminkan hubungan antara tingkat upah dan jumlah jam kerja yang bersedia ditawarkan oleh individu. Menurut Mankiw (2021), semakin tinggi upah yang ditawarkan, semakin besar kecenderungan individu untuk bekerja lebih banyak, karena imbalan dari bekerja melebihi nilai dari waktu luang.

Namun, teori penawaran tenaga kerja juga memperhitungkan efek substitusi dan efek pendapatan. Efek substitusi terjadi ketika upah meningkat, yang mendorong individu untuk mengurangi waktu luang dan meningkatkan jumlah jam kerja karena imbalan bekerja lebih besar. Sebaliknya, efek pendapatan terjadi ketika peningkatan upah mendorong individu untuk mengurangi jumlah jam kerja karena pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan individu mencapai tingkat kesejahteraan yang sama dengan lebih sedikit waktu kerja (Blanchard, 2017). Kedua efek ini bekerja secara bersamaan, dan hasil akhirnya tergantung pada mana yang lebih kuat dalam mempengaruhi keputusan tenaga kerja.

Di Indonesia, penawaran tenaga kerja juga dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural seperti kondisi pasar kerja, tingkat pendidikan, dan mobilitas tenaga kerja. Borjas (2019) menyatakan bahwa dalam kondisi pasar kerja yang kompetitif, tenaga kerja cenderung lebih responsif terhadap perubahan upah. Namun, di banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan dan daerah dengan akses pendidikan rendah, respons terhadap perubahan upah tidak selalu signifikan karena keterbatasan keterampilan dan pilihan pekerjaan yang terbatas (Tintingon, 2023). Hal ini mencerminkan adanya keterbatasan dalam penawaran tenaga kerja di sektor-sektor formal.



Penawaran tenaga kerja juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Program-program seperti subsidi upah, jaminan sosial, dan pelatihan kerja dapat

mempengaruhi tingkat penawaran tenaga kerja dengan memberikan insentif atau disinsentif untuk bekerja. Suaib (2022) menekankan bahwa program pelatihan kerja yang efektif dapat meningkatkan penawaran tenaga kerja, terutama di sektor formal, dengan memberikan keterampilan yang relevan kepada tenaga kerja. Di Indonesia, pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui program Kartu Prakerja dan pelatihan vokasional lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan meningkatkan partisipasi dalam sektor formal.

Selain kebijakan pemerintah, penawaran tenaga kerja juga dipengaruhi oleh perubahan demografis. Nasution (2021) menyebutkan bahwa bonus demografi yang saat ini dinikmati Indonesia memberikan peluang bagi peningkatan penawaran tenaga kerja. Dengan semakin banyak penduduk usia produktif yang memasuki pasar kerja, penawaran tenaga kerja di Indonesia akan meningkat signifikan. Namun, peningkatan penawaran tenaga kerja ini harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang cukup agar tidak menimbulkan peningkatan pengangguran struktural.

2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan upaya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan output ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Salah satu teori dasar dalam pertumbuhan ekonomi adalah model pertumbuhan Solow-Swan, yang dikembangkan pada 1950-an. Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tiga faktor utama: akumulasi modal, pertumbuhan jumlah tenaga kerja, dan kemajuan teknologi (Mankiw, 2019). Model

kankan bahwa dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi yang utan hanya dapat dicapai melalui kemajuan teknologi, karena akumulasi



modal dan peningkatan tenaga kerja hanya memberikan efek sementara pada pertumbuhan output.

Pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat dari perspektif yang lebih luas, di mana peran institusi, kebijakan pemerintah, dan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu yang signifikan. Menurut Todaro dan Smith (2020), pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor fisik seperti modal dan tenaga kerja, tetapi juga oleh kemampuan suatu negara untuk mengembangkan kelembagaan yang mendukung stabilitas ekonomi, inovasi, dan efisiensi pasar. Dalam konteks Indonesia, upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan kebijakan ekonomi (Sari Saudi et al, 2024).

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah mengalami fluktuasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun-tahun awal pasca-kemerdekaan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sering kali dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang berfokus pada industrialisasi dan pembangunan infrastruktur. Namun, pada tahun 1998, krisis ekonomi Asia menyebabkan kontraksi besar dalam perekonomian Indonesia (Ayu, 2024). Setelah itu, reformasi ekonomi dan politik yang dilakukan oleh pemerintah berhasil mendorong pemulihan ekonomi yang cepat, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 5-6% per tahun pada periode 2000 hingga 2020 (Bappenas, 2020).

Di Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada sektor-sektor utama seperti pertanian, perdagangan, dan jasa. Menurut BPS Sulawesi Selatan (2021), sektor pertanian menyumbang sebagian besar PDRB (Produk



: Regional Bruto) Sulawesi Selatan, namun sektor ini juga menghadapi tantangan dalam hal produktivitas. Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dapat

terus berlanjut jika ada peningkatan dalam diversifikasi sektor ekonomi dan peningkatan nilai tambah pada produk pertanian serta jasa. Selain itu, investasi dalam infrastruktur dan teknologi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di wilayah ini (Kusuma, 2021).

Teori pertumbuhan endogen, yang dikembangkan pada 1980-an oleh Paul Romer dan Robert Lucas, menawarkan pandangan yang lebih modern tentang pertumbuhan ekonomi. Teori ini menekankan peran investasi dalam modal manusia, inovasi, dan pengetahuan sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Blanchard, 2017). Dalam konteks ini, pengembangan pendidikan dan pelatihan menjadi faktor kunci dalam mendorong produktivitas dan inovasi. Negara yang berhasil mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat karena kemampuan tenaga kerjanya untuk beradaptasi dengan teknologi baru dan menciptakan inovasi.

Kebijakan fiskal dan moneter juga memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dan pendidikan dapat menciptakan efek multiplikasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, kebijakan fiskal ekspansif yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang stabil. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi ini inklusif dan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat (Iskandar, 2018).

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga sangat bergantung pada utan lingkungan dan keseimbangan antara penggunaan sumber daya i pelestarian lingkungan. Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan



sumber daya alam yang melimpah, sering kali menghadapi dilema antara eksploitasi sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan (Lasaiba, 2023). Dalam hal ini, kebijakan pembangunan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa merusak sumber daya alam yang menjadi penopang ekonomi jangka panjang.

2.1.4 Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah ukuran kualitas hidup yang mencakup tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (UNDP, 2022). Dalam kaitannya dengan TPAK, peningkatan IPM berkontribusi pada peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya mendorong partisipasi di pasar tenaga kerja. Menurut Wibowo (2019), IPM mengukur aspek kualitas hidup yang lebih luas dan mendalam, dengan memperhatikan kesejahteraan manusia yang tidak selalu tercermin dalam angka PDB.

Secara khusus, IPM dihitung berdasarkan tiga indikator utama. Pertama, harapan hidup pada saat lahir yang digunakan untuk menggambarkan kesehatan penduduk suatu negara. Kedua, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang mengukur akses dan kualitas pendidikan. Ketiga, pendapatan nasional bruto per kapita yang disesuaikan dengan daya beli, menggambarkan standar hidup penduduk (Todaro & Smith, 2020). Ketiga komponen ini mencerminkan keseimbangan antara aspek fisik, pendidikan, dan ekonomi yang menjadi fondasi kesejahteraan manusia.

Di Indonesia, IPM telah digunakan secara luas sebagai indikator pembangunan di tingkat nasional dan regional. Berdasarkan data Indonesia (2021), IPM Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun,



mencapai 72,29 pada 2020. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pendidikan dan kesehatan, meskipun disparitas antar daerah masih menjadi tantangan besar. Sebagai contoh, IPM di provinsi-provinsi seperti Sulawesi Selatan berada di atas rata-rata nasional, tetapi tetap tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah maju seperti DKI Jakarta dan Yogyakarta (BPS Sulawesi Selatan, 2021).

Peningkatan IPM sangat erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah yang berfokus pada pembangunan manusia. Program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat. Menurut Ayu (2024), kebijakan ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah, terutama di daerah-daerah terpencil dan pedesaan. Namun, meskipun terjadi peningkatan, kesenjangan dalam distribusi layanan masih menjadi tantangan utama, dengan daerah-daerah pedalaman sering kali memiliki akses yang terbatas (Reviane et al, 2024).

Di sisi lain, IPM juga dapat mencerminkan kapasitas suatu wilayah dalam memanfaatkan sumber daya manusia untuk pertumbuhan ekonomi. Menurut Wibowo (2019), negara-negara dengan IPM yang tinggi cenderung memiliki tenaga kerja yang lebih terampil, sehat, dan produktif, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Dalam konteks Indonesia, peningkatan IPM harus diimbangi dengan upaya untuk menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat didorong secara berkelanjutan.



1 juga menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan an tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*

Goals). Menurut Aditya (2023), IPM membantu pemerintah dalam memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Di Indonesia, IPM digunakan sebagai salah satu tolok ukur untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih fokus pada upaya peningkatan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan guna mencapai target pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, IPM mencerminkan sejauh mana pemerintah berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan manusia secara komprehensif. Peningkatan IPM di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam pembangunan manusia, namun tantangan tetap ada, terutama dalam mengatasi ketimpangan regional dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan.

2.1.5 Konsep Upah Minimum

Upah minimum adalah kebijakan pemerintah yang menetapkan batas terendah upah yang harus dibayarkan kepada pekerja. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi pekerja, terutama yang berada di sektor-sektor berupah rendah, dari eksploitasi, serta memastikan bahwa mereka memperoleh pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Mankiw (2019), upah minimum adalah instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menjaga standar kehidupan pekerja, namun efeknya terhadap pasar tenaga kerja sering kali kompleks dan dapat menimbulkan dampak yang berbeda-beda tergantung pada kondisi ekonomi.



ori dasar di balik upah minimum adalah konsep *floor price*, di mana ah menetapkan upah minimum di atas keseimbangan pasar untuk

melindungi tenaga kerja dari penawaran upah yang terlalu rendah. Namun, Neumark (2008) menjelaskan bahwa upah minimum juga dapat menciptakan pengangguran, terutama di kalangan pekerja yang kurang terampil. Ketika upah minimum ditetapkan di atas tingkat yang wajar, perusahaan mungkin memilih untuk mengurangi jumlah pekerja atau beralih ke teknologi yang lebih hemat tenaga kerja untuk mengimbangi biaya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, efek upah minimum pada tingkat pengangguran sangat dipengaruhi oleh elastisitas permintaan tenaga kerja.

Di Indonesia, kebijakan upah minimum telah diterapkan di setiap provinsi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015, penetapan upah minimum di Indonesia memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. BPS Sulawesi Selatan (2021) mencatat bahwa upah minimum provinsi di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mencapai Rp 3.165.876 pada tahun 2021. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli pekerja di tengah kenaikan harga barang dan jasa.

Namun, dampak upah minimum terhadap pasar tenaga kerja di Indonesia tidak selalu positif. Prasetyo (2021) dalam jurnalnya menekankan bahwa di sektor informal, kebijakan upah minimum sering kali tidak efektif karena banyak pekerja yang tidak terdaftar secara resmi. Hal ini membuat sebagian besar pekerja di sektor informal tetap menerima upah di bawah upah minimum. Di sektor formal, meskipun pekerja menikmati kenaikan upah, beberapa perusahaan, terutama yang berskala kecil dan menengah, mungkin menghadapi kesulitan dalam



ri persyaratan upah minimum dan akhirnya memilih untuk mengurangi tenaga kerja.

Efek upah minimum juga beragam di berbagai wilayah Indonesia, tergantung pada kondisi ekonomi daerah. Ayu (2024) menyebutkan bahwa di daerah dengan tingkat produktivitas yang lebih rendah, seperti di beberapa wilayah pedesaan, peningkatan upah minimum dapat menyebabkan pengurangan lapangan kerja. Sebaliknya, di daerah perkotaan dengan tingkat produktivitas yang lebih tinggi, upah minimum cenderung meningkatkan pendapatan pekerja tanpa menyebabkan dampak signifikan pada pengangguran. Oleh karena itu, fleksibilitas kebijakan upah minimum yang disesuaikan dengan kondisi lokal sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif terhadap pasar tenaga kerja (Nujum, 2024).

Upah minimum juga memainkan peran penting dalam menentukan daya saing tenaga kerja dan daya beli masyarakat. Sutanto (2020) menegaskan bahwa peningkatan upah minimum yang moderat dapat memberikan dorongan bagi konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dengan peningkatan upah, daya beli pekerja meningkat, yang pada akhirnya dapat mendorong permintaan barang dan jasa di pasar domestik. Namun, agar kebijakan ini efektif, harus ada keseimbangan antara peningkatan upah dan produktivitas tenaga kerja.

Pada akhirnya, kebijakan upah minimum di Indonesia harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan efek samping yang merugikan. Neumark (2008) menyarankan bahwa penetapan upah minimum harus disertai dengan program pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja, sehingga mereka dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitasnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peningkatan upah tidak hanya memberikan manfaat jangka

⌘ tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui ⌘ erja yang lebih produktif.



2.1.6 Konsep Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah salah satu indikator demografis utama yang memberikan gambaran mengenai skala populasi suatu negara atau wilayah. Dalam konteks ekonomi, jumlah penduduk berpengaruh langsung terhadap penawaran tenaga kerja, permintaan barang dan jasa, serta kapasitas produksi nasional (Mankiw, 2019). Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi lebih dari 273 juta jiwa pada tahun 2021, dinamika pertumbuhan penduduk menjadi faktor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial (Badan Pusat Statistik, 2021).

Pertumbuhan jumlah penduduk secara alami mempengaruhi berbagai aspek dalam perekonomian, termasuk permintaan terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Menurut Akasumbaawa et al (2021), pertumbuhan penduduk yang cepat dapat memberikan tekanan pada sumber daya yang tersedia, terutama di negara-negara berkembang, di mana pertumbuhan ekonomi belum cukup kuat untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk. Hal ini dapat menyebabkan masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Di Indonesia, laju pertumbuhan penduduk menurun sejak dekade 1970-an, terutama berkat program keluarga berencana yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun, meskipun laju pertumbuhan penduduk sudah menurun, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengelola distribusi penduduk yang tidak merata. Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara daerah-daerah lain seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara memiliki

n penduduk yang relatif rendah (Bappenas, 2020). Ayu (2024) menyoroti ketidakmerataan distribusi penduduk ini dapat menyebabkan ketimpangan



pembangunan antar wilayah, di mana daerah yang padat penduduk memiliki akses yang lebih baik terhadap infrastruktur dan layanan publik.

Jumlah penduduk juga berperan penting dalam menentukan struktur pasar tenaga kerja. Borjas (2019) menjelaskan bahwa negara dengan populasi besar cenderung memiliki tenaga kerja yang melimpah, yang dapat menjadi modal penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa tenaga kerja tersebut memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Di Indonesia, meskipun populasi usia kerja terus meningkat seiring dengan bonus demografi, kualitas tenaga kerja masih menjadi perhatian, terutama dalam hal pendidikan dan keterampilan (Prasetyo, 2021).

Selain itu, peningkatan jumlah penduduk juga dapat mempengaruhi permintaan agregat dalam perekonomian. Semakin banyak penduduk, semakin tinggi permintaan terhadap barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor produksi dan perdagangan. Namun, Mankiw (2021) mengingatkan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini terutama berlaku jika sebagian besar penduduk tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

Secara regional, jumlah penduduk juga berperan dalam menentukan prioritas kebijakan pembangunan di Indonesia. Bappenas (2020) menyebutkan bahwa daerah dengan pertumbuhan penduduk yang cepat, seperti Sulawesi

memerlukan kebijakan yang fokus pada penciptaan lapangan kerja, infrastruktur, dan layanan sosial yang lebih baik. Peningkatan jumlah



penduduk yang tidak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai dapat menyebabkan tekanan pada sumber daya publik, seperti pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran (Paddu et al, 2024).

Dalam jangka panjang, pengelolaan pertumbuhan penduduk menjadi sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Menurut Safira (2020), negara-negara yang berhasil mengelola pertumbuhan penduduknya dengan baik cenderung lebih mampu mencapai stabilitas ekonomi dan sosial. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk, bersama dengan investasi dalam pendidikan dan kesehatan, adalah kunci untuk memaksimalkan potensi ekonomi dari jumlah penduduk yang besar.

2.2 Hubungan antar Variabel

2.2.1 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di suatu negara. Menurut Mankiw (2021), pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, yang pada akhirnya dapat menarik lebih banyak penduduk usia kerja untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Ketika perekonomian tumbuh, perusahaan cenderung memperluas produksi dan operasi mereka, yang meningkatkan permintaan tenaga kerja. Hal ini mendorong individu yang sebelumnya berada di luar angkatan kerja untuk bergabung ke dalam pasar kerja, meningkatkan TPAK.

Di Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan TPAK. Menurut penelitian Prasetyo (2021),



rtumbuhan ekonomi Indonesia berada pada tingkat yang stabil, TPAK g meningkat karena banyaknya peluang kerja yang tercipta, terutama di

sektor-sektor seperti manufaktur, jasa, dan pertanian. Namun, Prasetyo juga mencatat bahwa peningkatan TPAK tidak selalu merata di seluruh sektor ekonomi. Sektor formal lebih cepat merespon pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sementara sektor informal sering kali tertinggal dalam hal menciptakan peluang kerja baru.

Selain itu, Syamsuddin et al (2021) menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat menjadi pendorong utama bagi peningkatan partisipasi angkatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif berarti bahwa manfaat dari peningkatan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, penduduk pedesaan, dan pekerja dengan keterampilan rendah. Dengan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata, lebih banyak individu yang terdorong untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir telah menciptakan peluang bagi kelompok-kelompok tersebut untuk bergabung ke dalam angkatan kerja.

Namun, Blanchard (2017) mencatat bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan TPAK tidak selalu linier. Dalam beberapa kasus, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat menciptakan masalah *jobless growth*, di mana perekonomian tumbuh tetapi tidak diiringi dengan peningkatan yang signifikan dalam penciptaan lapangan kerja. Hal ini biasanya terjadi ketika pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor-sektor yang padat modal seperti pertambangan atau teknologi, yang tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Di Indonesia, fenomena ini sering kali terjadi di sektor minyak dan energi, di mana pertumbuhan output tidak selalu sejalan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.



Sementara itu, penelitian dari Ayu (2024) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi regional juga memiliki dampak yang signifikan terhadap TPAK. Di wilayah- wilayah seperti Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam beberapa tahun terakhir telah menciptakan banyak peluang kerja di sektor pertanian dan jasa, yang berkontribusi pada peningkatan TPAK di wilayah tersebut. Namun, Ayu juga mencatat bahwa meskipun ada peningkatan dalam TPAK, kualitas pekerjaan yang tersedia sering kali masih menjadi masalah, terutama dalam hal upah dan perlindungan sosial.

Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat menjadi kunci untuk menjaga TPAK tetap tinggi. Sutanto (2020) menyoroti bahwa dengan meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan kerja, pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan lebih produktif, yang pada akhirnya mendorong lebih banyak individu untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan TPAK juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja serta memperluas akses terhadap pendidikan dan pelatihan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap TPAK, tetapi pengaruh tersebut sangat bergantung pada bagaimana pertumbuhan ekonomi dikelola dan didistribusikan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berfokus pada penciptaan lapangan kerja berkualitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa peningkatan TPAK tidak hanya terjadi dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan.



Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan tingkat pembangunan sosial dan ekonomi suatu wilayah. IPM mencakup tiga dimensi utama: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Peningkatan IPM sering kali dikaitkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kemampuan penduduk untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Menurut Todaro dan Smith (2020), IPM yang tinggi mencerminkan populasi yang lebih sehat, lebih terdidik, dan memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi, yang pada gilirannya mendorong tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang lebih tinggi.

Di Indonesia, penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara IPM dan TPAK. Wilayah-wilayah dengan IPM yang lebih tinggi, seperti DKI Jakarta dan Yogyakarta, cenderung memiliki TPAK yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah dengan IPM yang lebih rendah (BPS Indonesia, 2021). Hal ini karena penduduk di daerah dengan IPM tinggi umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, yang memungkinkan mereka untuk lebih siap berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Ayu (2024) juga mencatat bahwa di wilayah-wilayah dengan IPM tinggi, penduduk cenderung memiliki keterampilan yang lebih baik, yang meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja.

Pendidikan, salah satu komponen utama IPM, memainkan peran penting dalam menentukan kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Nasution (2021) menjelaskan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi tidak hanya meningkatkan keterampilan individu, tetapi juga membuka akses terhadap pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi. Di Indonesia, akses terhadap pendidikan melalui program seperti Kartu Indonesia



Pintar (KIP) telah meningkatkan jumlah angkatan kerja yang memiliki keterampilan formal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan di Indonesia berkontribusi pada peningkatan TPAK, terutama di kalangan perempuan dan penduduk di daerah pedesaan (Prasetyo, 2021).

Selain pendidikan, kesehatan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi hubungan antara IPM dan TPAK. Penduduk yang sehat cenderung lebih produktif dan mampu bekerja lebih lama, yang berkontribusi pada peningkatan partisipasi angkatan kerja. Layanan kesehatan yang memadai memastikan bahwa individu dapat tetap aktif di pasar tenaga kerja, bahkan di usia tua. Di Indonesia, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah membantu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, yang berdampak positif pada TPAK di beberapa wilayah (Yuliastuti, 2023).

Namun, meskipun ada hubungan positif antara IPM dan TPAK, tantangan tetap ada dalam hal distribusi pembangunan manusia. Bappenas (2020) mencatat bahwa ketimpangan dalam IPM di berbagai wilayah Indonesia mengakibatkan disparitas dalam TPAK. Daerah-daerah dengan IPM rendah, seperti Papua dan Nusa Tenggara, cenderung memiliki TPAK yang lebih rendah karena penduduk di wilayah tersebut sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Hal ini menciptakan tantangan bagi pemerintah dalam mendorong partisipasi angkatan kerja secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, peningkatan IPM tidak selalu langsung tercermin dalam peningkatan TPAK, terutama jika tidak ada peluang kerja yang memadai di wilayah dengan IPM tinggi. Menurut Ayu (2024), di beberapa wilayah di Indonesia,



1 IPM meningkat, kurangnya lapangan kerja yang tersedia
2 atkan penduduk usia kerja tetap berada di luar angkatan kerja. Hal ini

menyoroti pentingnya kebijakan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan IPM, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja.

Secara keseluruhan, peningkatan IPM berkontribusi pada peningkatan TPAK, terutama melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan yang mendorong produktivitas dan partisipasi dalam pasar tenaga kerja. Namun, untuk memastikan bahwa peningkatan IPM benar-benar berdampak positif pada TPAK, perlu ada kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan memastikan bahwa manfaat pembangunan manusia dirasakan oleh seluruh wilayah di Indonesia.

2.2.3 Hubungan antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Upah minimum merupakan salah satu instrumen kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk melindungi pekerja, terutama di sektor-sektor berupah rendah. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja memperoleh pendapatan yang layak dan dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum mereka. Menurut Borjas (2019), upah minimum mempengaruhi pasar tenaga kerja dengan cara meningkatkan pendapatan pekerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan minat individu untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, sehingga meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Di Indonesia, upah minimum ditetapkan berdasarkan pertimbangan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kebutuhan hidup layak (BPS Indonesia, 2021). Penetapan upah minimum yang lebih tinggi sering kali mendorong peningkatan partisipasi tenaga kerja, terutama di sektor formal. Menurut Ramadhan (2023),

upah minimum di beberapa provinsi di Indonesia berkontribusi pada tan TPAK karena individu yang sebelumnya enggan bekerja akibat



rendahnya upah kini lebih terdorong untuk masuk ke pasar kerja. Hal ini terutama berlaku bagi pekerja dengan keterampilan menengah ke bawah yang lebih sensitif terhadap perubahan upah.

Namun, dampak upah minimum terhadap TPAK tidak selalu seragam. Neumark (2008) menyebutkan bahwa upah minimum yang terlalu tinggi bisa menyebabkan pengurangan kesempatan kerja, terutama di kalangan pekerja kurang terampil dan sektor-sektor yang padat karya. Di Indonesia, sektor-sektor seperti pertanian dan manufaktur kecil sering kali terkena dampak negatif dari kenaikan upah minimum karena biaya tenaga kerja yang lebih tinggi menyebabkan pengusaha mengurangi jumlah pekerja atau beralih ke teknologi yang lebih efisien (Ramadhan, 2023). Fenomena ini dapat menyebabkan penurunan TPAK di sektor-sektor tersebut.

Di sisi lain, upah minimum yang moderat dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah dapat memberikan dampak positif pada TPAK. Santoso (2018) menekankan bahwa kebijakan upah minimum yang diterapkan secara tepat dan fleksibel sesuai dengan kondisi pasar tenaga kerja di masing-masing wilayah dapat mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja tanpa menyebabkan lonjakan pengangguran. Di Sulawesi Selatan, misalnya, peningkatan upah minimum telah berhasil menarik lebih banyak pekerja ke sektor formal tanpa mengurangi jumlah lapangan kerja yang tersedia (BPS Sulawesi Selatan, 2021).

Selain itu, upah minimum juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan daya beli masyarakat. Kaldor (1955) menunjukkan



naikan upah minimum meningkatkan daya beli pekerja berpenghasilan
rang pada akhirnya mendorong konsumsi domestik. Peningkatan daya

beli ini memiliki efek berantai dalam menciptakan permintaan yang lebih besar di sektor- sektor lain, yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya meningkatkan TPAK melalui penciptaan lapangan kerja baru.

Namun, Ramadhan (2023) juga menyoroiti bahwa meskipun upah minimum dapat meningkatkan TPAK, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada pelaksanaannya. Banyak pekerja di sektor informal tidak dilindungi oleh kebijakan upah minimum, sehingga mereka tetap bekerja dengan upah di bawah standar yang ditetapkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa upah minimum cenderung lebih efektif di sektor formal, sementara dampaknya terhadap sektor informal relatif terbatas. Hal ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam memperluas cakupan perlindungan tenaga kerja, terutama di sektor-sektor informal.

Kesimpulannya, upah minimum berpotensi meningkatkan TPAK, terutama di sektor formal, dengan mendorong lebih banyak orang untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana penetapannya disesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal dan dampak jangka panjangnya terhadap permintaan tenaga kerja. Untuk memaksimalkan manfaatnya, kebijakan upah minimum harus diimbangi dengan kebijakan lain yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan melindungi pekerja di sektor informal.

2.2.4 Hubungan antara Jumlah Penduduk dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Jumlah penduduk yang besar menciptakan potensi untuk memiliki angkatan kerja yang lebih besar, namun

ilan dalam memanfaatkan jumlah penduduk ini sangat tergantung pada pemerintah dan kondisi ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan



kerja. Menurut Ramadhan (2023), semakin besar populasi suatu negara, semakin besar pula potensi angkatan kerja yang dapat dihasilkan, namun peningkatan jumlah penduduk harus diiringi dengan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang seimbang.

Di Indonesia, jumlah penduduk yang besar memberikan peluang besar bagi peningkatan TPAK. Arifin (2023) menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia produktif, yang didorong oleh bonus demografi, berkontribusi pada peningkatan partisipasi angkatan kerja di beberapa wilayah di Indonesia. Bonus demografi ini merupakan kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi daripada penduduk usia non-produktif, yang menciptakan kesempatan bagi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan partisipasi tenaga kerja.

Namun, jumlah penduduk yang besar tidak selalu berarti peningkatan TPAK secara otomatis. Astuti (2019) mencatat bahwa meskipun Indonesia memiliki populasi yang besar, TPAK tidak merata di seluruh wilayah. Beberapa daerah dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, seperti Papua dan Nusa Tenggara, justru memiliki TPAK yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti Jawa dan Bali. Hal ini disebabkan oleh kurangnya infrastruktur, lapangan kerja yang terbatas, dan rendahnya kualitas pendidikan di daerah-daerah tersebut, yang menghambat penduduk untuk berpartisipasi secara optimal dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, distribusi penduduk yang tidak merata juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja. Menurut Blanchard (2017), di daerah-daerah dengan konsentrasi penduduk yang tinggi, seperti di perkotaan,



pendukung lebih tinggi karena tersedianya lapangan kerja yang lebih banyak dan akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang lebih baik.

Sebaliknya, di daerah-daerah pedesaan dengan populasi yang tersebar, penduduk cenderung lebih terlibat dalam pekerjaan di sektor informal, yang sering kali tidak tercatat secara resmi dalam statistik TPAK.

Safira (2020) menambahkan bahwa di beberapa daerah dengan pertumbuhan penduduk yang cepat, seperti Sulawesi Selatan, tantangan yang muncul adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk menampung peningkatan angkatan kerja. Meskipun jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi ekonomi, jika tidak diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai, hal ini dapat menyebabkan peningkatan pengangguran, terutama di kalangan penduduk usia produktif.

Jumlah penduduk juga berperan dalam menentukan kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan tenaga kerja dan pendidikan. Prasetyo (2021) menekankan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia produktif harus diiringi dengan peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan. Tanpa investasi dalam sumber daya manusia, peningkatan jumlah penduduk hanya akan menambah tekanan pada pasar tenaga kerja dan menciptakan masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan. Di Indonesia, pemerintah telah berupaya untuk mengatasi masalah ini melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, namun tantangan dalam hal distribusi masih tetap ada.

Secara keseluruhan, hubungan antara jumlah penduduk dan TPAK sangat bergantung pada bagaimana pemerintah dapat mengelola pertumbuhan penduduk tersebut. Dengan kebijakan yang tepat, peningkatan jumlah penduduk dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan

aman, jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan jumlah



penduduk dapat menjadi beban ekonomi yang berujung pada peningkatan pengangguran.

2.3 Tinjauan Empiris

Penelitian internasional oleh Neumark dan Wascher (2008) tentang kebijakan upah minimum terhadap pekerjaan dan partisipasi angkatan kerja di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan kenaikan upah minimum dapat meningkatkan TPAK, terutama di sektor formal. Namun, jika upah minimum terlalu tinggi dibandingkan produktivitas tenaga kerja, hal ini dapat menyebabkan pengurangan jumlah tenaga kerja yang diserap, khususnya di sektor-sektor padat karya.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryahadi, Widyanti dan Perwira (2003) tentang dampak kebijakan upah minimum terhadap pekerjaan di sektor formal di Indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan Kebijakan upah minimum di Indonesia meningkatkan TPAK di sektor formal. Namun, terdapat indikasi bahwa sebagian tenaga kerja berpindah ke sektor informal akibat ketidakmampuan sektor formal untuk menyerap tenaga kerja tambahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Haspa (2023) tentang pendidikan, upah dan pertumbuhan ekonomi terhadap TPAK di Nusa Tenggara Barat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap TPAK. Sedangkan berbeda dengan upah dan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK di Nusa Tenggara Barat

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningtias (2019) tentang analisis faktor yang mempengaruhi TPAK di Pulau Jawa. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum dan rata-rata lama sekolah, berkontribusi positif dan signifikan terhadap peningkatan TPAK di Pulau Jawa. Namun, terdapat perbedaan



dengan variabel PDRB dan jumlah orang yang mengurus rumah tangga yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap TPAK di Pulau Jawa.

Penelitian yang dilakukan oleh Claver (2023) tentang indeks pembangunan manusia dan tingkat partisipasi angkatan kerja di 5 wilayah perkotaan Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di 5 wilayah perkotaan Sulawesi Selatan. Kemudian, IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di 5 wilayah perkotaan Sulawesi Selatan. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di 5 wilayah perkotaan Sulawesi Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Syafira Et al (2023) tentang Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah penduduk dan Upah minimum di Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK di Sumatera Utara. Namun, berbeda halnya dengan upah minimum yang berpengaruh tidak signifikan terhadap TPAK di Sumatera Utara.

2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir dalam penelitian Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Indeks Pembangunan Manusia, (3) Upah Minimum Provinsi dan (4) Jumlah Penduduk. Variabel-variabel tersebut akan lebih mengarahkan peneliti untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.



gkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah < usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau secara aktif mencari

pekerjaan dibandingkan dengan total populasi usia kerja dalam suatu wilayah tertentu. TPAK digunakan untuk mengukur sejauh mana penduduk usia kerja terlibat dalam pasar tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal.

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas suatu perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi diukur melalui perubahan persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil dari satu tahun ke tahun berikutnya.

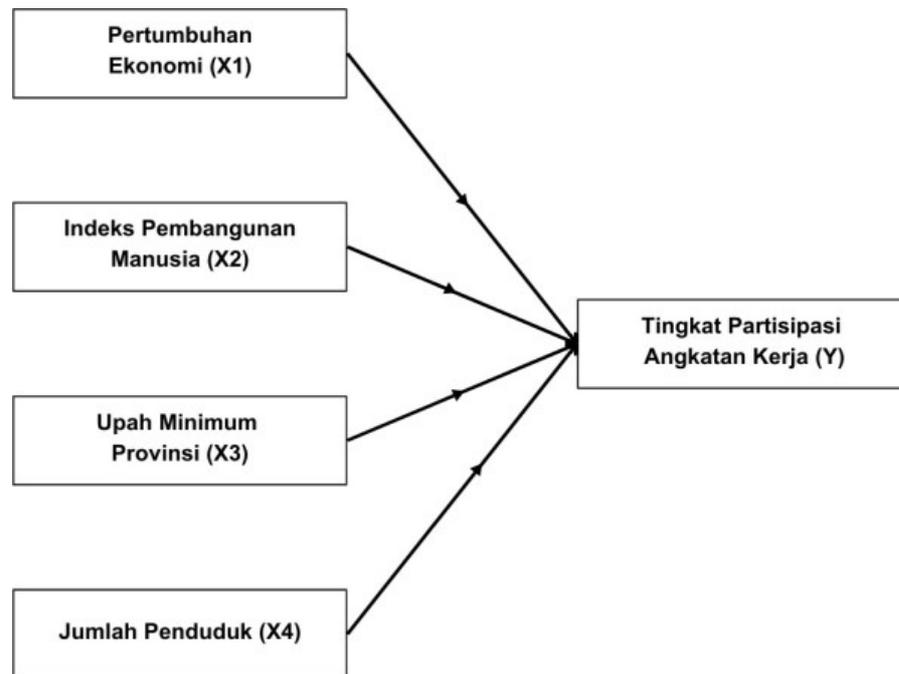
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran yang menggabungkan tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (diukur dengan harapan hidup saat lahir), pengetahuan (diukur dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (diukur dengan PDRB per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli).

Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah batas terendah upah yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja dalam suatu wilayah provinsi, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan. UMP digunakan untuk melindungi pekerja dari eksploitasi upah yang tidak layak dan untuk memastikan bahwa pekerja menerima kompensasi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka.

Jumlah penduduk didefinisikan sebagai total populasi yang tinggal di suatu wilayah tertentu pada suatu waktu tertentu. Dalam konteks penelitian ini, jumlah penduduk mencakup seluruh penduduk yang tinggal di wilayah penelitian, dengan perhatian khusus pada proporsi penduduk usia kerja (15-64 tahun).

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, Gambar 2.1 adalah pikir yang berfungsi sebagai acuan untuk mencerminkan pola pikir yang n sebagai dasar penyusunan dan perumusan hipotesis sebagai berikut:





Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

1. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Sulawesi Selatan
2. Diduga indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Sulawesi Selatan
3. Diduga upah minimum provinsi berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Sulawesi Selatan
4. Diduga jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Sulawesi Selatan

